

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Master
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

OLEH :

**HADI PUTRA
1920842004**



Pembimbing:

**Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.
Dr. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M**

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Hadi Putra, No. BP. 1920842004, Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Balairung Citrajaya Sumbar, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2021. Dibimbing oleh: Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.dan Dr. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M. Tesis ini terdiri dari 169Halaman,34buku teori,7buku metode,1 Disertasi, 3 Tesis, 18Artikel Jurnal/Karya Ilmiah,2 Undang-undang, 1 Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan Daerah, 1 Laporan, 2dokumen, dan7website internet.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian dari siklus kebijakan yang memiliki peran penting untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan. Salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah daerah yaitu kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Balairung Citrajaya Sumbar milik Provinsi Sumatera Barat yang menuai banyak sorotan.Teori yang digunakan adalah tipe evaluasi efektifitas dan evaluasi efisiensi oleh Althaus, Brigman & Davis dengan indikator evaluasi yaitu: input, proses, output, dan outcome. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi, dan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dengan cara reduksi data, pemodelan/display data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar belum efektif dan tidak efisien berdasarkan:(1) Pada input kebijakan terdapat komponen utama yang tidak disediakan yaitu *feasibility study*, sumber daya manusia sudah memadai, sumberdaya keuangan belum sepenuhnya diterima dari beberapa kabupaten/kota sesuai perjanjian kerjasama pendirian PT.BCS.(2) Proses kebijakan sudah mencapai sasaran yaitu terbentuk dan beroperasinya PT. BCS. Implementor kebijakan sudah menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing. Namun belum efektif dalam pencapaian tujuan serta tidak efisien dalam mengelola input menjadi output,(3) Output kebijakan sudah diterima berupa deviden, namun belum bisa secara kontiniu danrasionalnya masih sangat kecil dibanding investasi yang dikeluarkan karena perusahaan selalu merugi akibat beban penyusutan aset tetap yang terlalu besar. (4) Outcome kebijakan sesuai tujuan formalnya belum signifikan karena kecilnya pendapatan daerah yang diterima dari BUMD ini. Dampak positif lainnya yaitu pada aspek sosial budaya Hotel Balairung menjadi *icon*kebanggaan dan *meeting point* masyarakat Sumatera Barat di Jakarta. Sedangkan dampak negatifnya antara lain *image* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak mampu mengelola PT.BCS dengan baik dan berkurangnya fungsi Balairung sebagai tempat bernaungnya orang Minang di Jakarta. Selain itu juga penambahan beban APBD untuk sewa kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, BUMD, PT.Balairung Citrajaya Sumbar